

Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2014



Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2014



STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH
2014

ISSN : 2407344X
Katalog BPS : 7203005.33
No. Publikasi : 33540.1509
Ukuran Buku : 21 cm x 29,5 cm
Jumlah Halaman : ix + 87 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

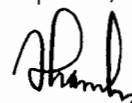
KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2013 – 2014 merupakan kelanjutan dari publikasi yang sama sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Tengah. Buku ini memberi gambaran Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berguna sebagai sumber informasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas. Di samping itu, data yang tersaji dalam publikasi ini juga dapat digunakan untuk melengkapi berbagai keperluan penyusunan statistik, misalnya untuk keperluan penghitungan Pendapatan Nasional/Regional, Neraca Sektor Publik, Tabel Input - Output dan lain-lain.

Data yang disajikan pada publikasi ini bersumber dari instansi Biro/Bagian Keuangan Kantor Gubernur/Bupati/Walikota di Jawa Tengah yang dikumpulkan oleh petugas BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan menggunakan daftar yang khusus disusun oleh BPS RI.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini disampaikan terima kasih. Semua kritik dan saran sangat dihargai untuk perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Semarang, November 2015
Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Drs. Ibram Syahboedin, MA *ji*

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
II. KONSEP dan DEFINISI	3
2.1. Anggaran/Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi	3
2.1.1. Pendapatan Daerah	3
2.1.2. Belanja Daerah	6
2.2. Anggaran/Realisasi Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	9
2.3. Anggaran/Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	11
2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	11
2.3.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.....	12
LAMPIRAN (TABEL-TABEL)	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	14
Tabel 2	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	15
Tabel 3	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 - 2014	16
Tabel 4	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	17
Tabel 5	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	18
Tabel 6	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	19
Tabel 7	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	20
Tabel 8	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	21
Tabel 9	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	22
Tabel 10	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	23
Tabel 11	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	24
Tabel 12	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	25
Tabel 13	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	26
Tabel 14	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	27

Tabel 15	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	28
Tabel 16	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	29
Tabel 17	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	30
Tabel 18	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	31
Tabel 19	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	32
Tabel 20	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	33
Tabel 21	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	34
Tabel 22	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	35
Tabel 23	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	36
Tabel 24	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	37
Tabel 25	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	38
Tabel 26	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	39
Tabel 27	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	40
Tabel 28	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	41
Tabel 29	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	42

Tabel 30	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	43
Tabel 31	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	44
Tabel 32	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	45
Tabel 33	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	46
Tabel 34	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	47
Tabel 35	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	48
Tabel 36	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	49
Tabel 37	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	50
Tabel 38	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	51
Tabel 39	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	52
Tabel 40	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	53
Tabel 41	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	54
Tabel 42	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	55
Tabel 43	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	56
Tabel 44	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	57

Tabel 45	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	58
Tabel 46	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	59
Tabel 47	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	60
Tabel 48	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	61
Tabel 49	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	62
Tabel 50	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	63
Tabel 51	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	64
Tabel 52	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	65
Tabel 53	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	66
Tabel 54	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	67
Tabel 55	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	68
Tabel 56	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	69
Tabel 57	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	70
Tabel 58	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	71
Tabel 59	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	72

Tabel 60	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	73
Tabel 61	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	74
Tabel 62	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	75
Tabel 63	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	76
Tabel 64	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	77
Tabel 65	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	78
Tabel 66	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	79
Tabel 67	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	80
Tabel 68	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	81
Tabel 69	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	82
Tabel 70	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	83
Tabel 71	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	84
Tabel 72	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	85
Tabel 73	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013 – 2014	86
Tabel 74	Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013 – 2014	87

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi. Diharapkan dengan adanya kewenangan tersebut daerah otonom dapat memperoleh sumber pembiayaan dalam melaksanakan otonominya. Untuk itu pemerintah daerah dituntut dapat mengelola kewenangannya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga merupakan kewajiban yang harus dibuat setiap akhir pelaksanaan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

1.2. TUJUAN

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan maka alasan untuk mengumpulkan data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.
2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah di bawahnya.

1.3. RUANG LINGKUP

Survei ini dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota se Jawa Tengah atau dengan kata lain pencacahan dilakukan secara lengkap di 35 Kabupaten/Kota dan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data yang dikumpulkan hanya sebatas mengenai Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan Definisi serta Format daftar pertanyaan yang digunakan dalam pengumpulan data Statistik Keuangan Pemerintah mengacu pada format pelaporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006.

2.1. ANGGARAN/REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b. Retribusi Daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, dan lain-lain.

Rincian 2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari :

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a.1. Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan

hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

a.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Rincian 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2.1.2. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tak Langsung
2. Belanja Langsung

Rincian 1 Belanja Tak Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja tak langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai Berupa Gaji dan Tunjangan Yang Telah Ditetapkan Undang-Undang

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal

outstanding) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

d. Belanja Hibah

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota

- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah / pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

h. Belanja Tak Terduga

Adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rincian 2 Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program.

Belanja langsung terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

c. Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. ANGGARAN/REALISASI BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Adalah belanja daerah yang dirinci menurut alokasi pengeluaran sebagaimana ditentukan di dalam keputusan menteri yang terakhir.

Rincian 1 Pelayanan Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.

Rincian 2 Ketertiban dan Keamanan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.

Rincian 3 Ekonomi

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor perhubungan, ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.

Rincian 4 Lingkungan Hidup

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.

Rincian 5 Perumahan dan Fasilitas Umum

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.

Rincian 6 Kesehatan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.

Rincian 7 Pariwisata dan Budaya

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata dan sejenisnya.

Rincian 8 Pendidikan

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.

Rincian 9 Perlindungan Sosial

Adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

2.3. ANGGARAN/REALISASI PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

2.3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Adalah Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

6. Penerimaan Piutang Daerah.

Adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

2.3.2. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

LAMPIRAN

TABEL-TABEL

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan	2 013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	13 343 358 327	13 737 158 183
1. Pendapatan Asli Daerah	8 212 800 641	8 347 874 665
1.1. Pajak Daerah	6 716 170 095	7 097 094 340
1.2. Retribusi Daerah	69 970 596	78 031 283
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	263 267 978	279 440 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	1 163 391 972	893 309 042
2. Dana Perimbangan	2 467 814 629	2 606 901 162
2.1. Bagi Hasil Pajak	583 478 946	589 474 308
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	130 953 804	134 330 425
2.3. Dana Alokasi Umum	1 670 859 369	1 803 931 189
2.4. Dana Alokasi Khusus	82 522 510	79 165 240
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 662 743 057	2 782 382 356
B. Pembiayaan Daerah	1 306 017 472	300 000 000
Jumlah	14 649 375 799	14 037 158 183

*) Data APBD

Tabel 2 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	9 213 696 623	9 837 614 877
1. Belanja Pegawai	1 368 517 191	1 956 121 339
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	3 499 864 177	3 038 721 398
5. Belanja Bantuan Sosial	14 362 375	31 666 000
6. Belanja Bagi Hasil	1 825 598 247	2 720 713 995
7. Belanja Bantuan Keuangan	2 503 166 398	2 060 392 145
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 188 235	30 000 000
B. Belanja Langsung	3 511 079 685	4 159 543 306
1. Belanja Pegawai	373 147 586	315 497 018
2. Belanja Barang dan Jasa	2 143 191 579	2 402 069 877
3. Belanja Modal	994 740 520	1 441 976 411
C. Pembiayaan Daerah	1 924 599 491	40 000 000
Jumlah	14 649 375 799	14 037 158 183

*) Data APBD

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota
Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Penerimaan
(ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	48 661 341 656	49 843 494 347
1.	Pendapatan Asli Daerah	6 092 969 558	6 071 797 912
1.1.	Pajak Daerah	2 345 506 772	2 184 035 333
1.2.	Retribusi Daerah	942 583 356	1 208 864 982
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	234 944 641	241 962 056
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	2 569 934 789	2 436 935 541
2.	Dana Perimbangan	31 678 228 507	33 844 854 702
2.1.	Bagi Hasil Pajak	1 555 386 355	1 241 881 659
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	292 118 888	247 408 505
2.3.	Dana Alokasi Umum	27 817 033 473	30 125 528 326
2.4.	Dana Alokasi Khusus	2 013 689 791	2 230 036 212
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	10 890 143 591	9 926 841 733
B.	Pembiayaan Daerah	5 834 474 684	4 197 712 293
Jumlah		54 495 816 340	54 041 206 640

*) Data APBD

Tabel 4 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota
Seluruh Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran
(ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	29 333 631 280	32 658 078 631
1. Belanja Pegawai	25 670 917 512	28 996 669 621
2. Belanja Bunga	73 194 573	4 158 638
3. Belanja Subsidi	1 142 848	1 674 389
4. Belanja Hibah	1 381 220 312	1 176 437 610
5. Belanja Bantuan Sosial	382 132 197	362 242 593
6. Belanja Bagi Hasil	52 284 831	78 967 598
7. Belanja Bantuan Keuangan	1 741 227 153	1 903 828 579
8. Pengeluaran Tidak Terduga	31 511 854	134 099 603
B. Belanja Langsung	16 911 469 421	20 902 183 198
1. Belanja Pegawai	1 595 837 847	1 668 603 662
2. Belanja Barang dan Jasa	7 962 925 033	10 045 213 398
3. Belanja Modal	7 352 706 541	9 188 366 138
C. Pembiayaan Daerah	8 250 715 639	480 944 811
Jumlah	54 495 816 340	54 041 206 640

*) Data APBD

Tabel 5 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 121 738 500	2 057 405 849
1. Pendapatan Asli Daerah	278 890 649	230 155 062
1.1. Pajak Daerah	114 329 745	88 280 500
1.2. Retribusi Daerah	35 957 313	21 440 906
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 692 259	9 928 444
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	119 911 332	110 505 212
2. Dana Perimbangan	1 384 770 341	1 474 669 354
2.1. Bagi Hasil Pajak	70 382 610	66 367 377
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 915 321	6 976 313
2.3. Dana Alokasi Umum	1 197 315 060	1 291 121 704
2.4. Dana Alokasi Khusus	108 157 350	110 203 960
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	458 077 510	352 581 433
B. Pembiayaan Daerah	276 726 860	96 813 930
Jumlah	2 398 465 360	2 154 219 779
*) Data APBD		

Tabel 6 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 250 963 944	1 390 079 370
1. Belanja Pegawai	1 038 285 452	1 214 780 013
2. Belanja Bunga	18 085	53 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	105 105 147	49 447 595
5. Belanja Bantuan Sosial	3 472 600	2 635 250
6. Belanja Bagi Hasil	390 671	434 613
7. Belanja Bantuan Keuangan	103 662 989	114 228 899
8. Pengeluaran Tidak Terduga	29 000	8 500 000
B. Belanja Langsung	796 184 602	758 253 765
1. Belanja Pegawai	86 136 550	82 057 148
2. Belanja Barang dan Jasa	288 875 390	302 294 083
3. Belanja Modal	421 172 662	373 902 534
C. Pembiayaan Daerah	351 316 814	5 886 644
Jumlah	2 398 465 360	2 154 219 779

*) *Data APBD*

Tabel 7 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	2 037 636 075	2 113 895 826
1.	Pendapatan Asli Daerah	308 349 434	317 727 920
1.1.	Pajak Daerah	111 290 150	103 300 000
1.2.	Retribusi Daerah	35 193 668	64 093 633
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 578 805	10 192 885
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	151 286 811	140 141 402
2.	Dana Perimbangan	1 271 384 113	1 372 626 308
2.1.	Bagi Hasil Pajak	58 503 433	64 277 893
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6 278 012	1 118 283
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 127 939 938	1 224 710 992
2.4.	Dana Alokasi Khusus	78 662 730	82 519 140
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	457 902 528	423 541 598
B.	Pembiayaan Daerah	354 397 165	270 980 189
Jumlah		2 392 033 240	2 384 876 015
*) Data APBD			

Tabel 8 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banyumas Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 248 883 348	1 468 695 333
1. Belanja Pegawai	1 120 636 539	1 344 337 720
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	55 574 426	41 232 535
5. Belanja Bantuan Sosial	3 546 000	7 841 410
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	68 769 737	70 874 166
8. Pengeluaran Tidak Terduga	356 646	4 409 502
B. Belanja Langsung	769 169 617	891 680 682
1. Belanja Pegawai	60 940 982	74 577 074
2. Belanja Barang dan Jasa	395 039 659	452 372 921
3. Belanja Modal	313 188 976	364 730 687
C. Pembiayaan Daerah	373 980 275	24 500 000
Jumlah	2 392 033 240	2 384 876 015

*) Data APBD

Tabel 9 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 185 891 729	1 241 957 454
1.	Pendapatan Asli Daerah	122 858 740	162 115 573
1.1.	Pajak Daerah	21 424 650	27 715 000
1.2.	Retribusi Daerah	29 293 478	61 599 633
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 651 727	10 717 068
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	61 488 885	62 083 872
2.	Dana Perimbangan	830 569 180	865 625 908
2.1.	Bagi Hasil Pajak	36 920 900	22 986 298
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 822 200	7 382 781
2.3.	Dana Alokasi Umum	719 185 020	777 989 499
2.4.	Dana Alokasi Khusus	66 641 060	57 267 330
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	232 463 809	214 215 973
B.	Pembiayaan Daerah	84 979 691	55 019 428
Jumlah		1 270 871 420	1 296 976 882
*) <i>Data APBD</i>			

Tabel 10 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	706 646 864	795 333 036
1. Belanja Pegawai	629 339 102	712 764 963
2. Belanja Bunga	24 687	24 688
3. Belanja Subsidi	400 000	400 000
4. Belanja Hibah	16 624 492	15 163 941
5. Belanja Bantuan Sosial	8 446 250	10 139 250
6. Belanja Bagi Hasil	12 982	17 500
7. Belanja Bantuan Keuangan	51 722 968	54 926 799
8. Pengeluaran Tidak Terduga	76 383	1 895 895
B. Belanja Langsung	419 910 169	486 980 124
1. Belanja Pegawai	30 529 591	37 690 941
2. Belanja Barang dan Jasa	276 613 208	319 551 849
3. Belanja Modal	112 767 370	129 737 334
C. Pembiayaan Daerah	144 314 387	14 663 722
Jumlah	1 270 871 420	1 296 976 882

*) Data APBD

Tabel 11 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 279 702 466	1 289 493 725
1.	Pendapatan Asli Daerah	98 975 319	103 502 350
1.1.	Pajak Daerah	14 159 375	27 770 000
1.2.	Retribusi Daerah	26 005 524	26 090 137
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 839 655	6 582 563
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	53 970 765	43 059 650
2.	Dana Perimbangan	879 697 278	913 491 560
2.1.	Bagi Hasil Pajak	45 892 139	26 145 973
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	895 942	235 128
2.3.	Dana Alokasi Umum	763 426 567	826 044 419
2.4.	Dana Alokasi Khusus	69 482 630	61 066 040
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	301 029 869	272 499 815
B.	Pembiayaan Daerah	173 834 365	164 683 962
Jumlah		1 453 536 831	1 454 177 687
*) Data APBD			

Tabel 12 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	781 887 101	915 624 064
1. Belanja Pegawai	691 175 990	816 135 201
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	42 984 831	41 754 363
5. Belanja Bantuan Sosial	10 301 440	15 253 500
6. Belanja Bagi Hasil	1 415 716	2 072 627
7. Belanja Bantuan Keuangan	35 972 074	36 908 373
8. Pengeluaran Tidak Terduga	37 050	3 500 000
B. Belanja Langsung	393 586 928	533 097 123
1. Belanja Pegawai	34 568 504	44 755 434
2. Belanja Barang dan Jasa	183 100 414	252 998 465
3. Belanja Modal	175 918 010	235 343 224
C. Pembiayaan Daerah	278 062 802	5 456 500
Jumlah	1 453 536 831	1 454 177 687

*) Data APBD

Tabel 13 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kebumen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 626 530 654	1 709 905 366
1.	Pendapatan Asli Daerah	131 481 737	126 853 275
1.1.	Pajak Daerah	42 012 444	38 797 026
1.2.	Retribusi Daerah	24 542 087	30 948 107
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 506 191	6 300 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	59 421 015	50 808 142
2.	Dana Perimbangan	1 135 499 307	1 234 875 449
2.1.	Bagi Hasil Pajak	33 627 117	28 133 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	937 150	464 395
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 021 871 180	1 125 568 884
2.4.	Dana Alokasi Khusus	79 063 860	80 709 170
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	359 549 610	348 176 642
B.	Pembiayaan Daerah	114 972 071	75 572 253
Jumlah		1 741 502 725	1 785 477 619

*) Data APBD

Tabel 14 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kebumen
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 068 350 146	1 188 019 376
1. Belanja Pegawai	956 479 532	1 068 198 167
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	3 773 767	13 289 550
5. Belanja Bantuan Sosial	37 697 762	24 479 638
6. Belanja Bagi Hasil	2 400 303	4 356 653
7. Belanja Bantuan Keuangan	67 955 880	76 245 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	42 902	1 450 368
B. Belanja Langsung	479 826 560	586 313 243
1. Belanja Pegawai	46 791 859	48 726 465
2. Belanja Barang dan Jasa	146 075 787	168 365 025
3. Belanja Modal	286 958 914	369 221 753
C. Pembiayaan Daerah	193 326 019	11 145 000
Jumlah	1 741 502 725	1 785 477 619

*) Data APBD

Tabel 15 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 289 037 659	1 369 486 481
1.	Pendapatan Asli Daerah	127 565 801	135 087 317
1.1.	Pajak Daerah	30 475 171	30 682 162
1.2.	Retribusi Daerah	16 923 314	30 741 119
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 153 669	4 596 132
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	76 013 647	69 067 904
2.	Dana Perimbangan	880 733 787	936 592 882
2.1.	Bagi Hasil Pajak	26 156 409	20 739 434
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 349 679	4 091 333
2.3.	Dana Alokasi Umum	793 904 679	854 737 495
2.4.	Dana Alokasi Khusus	53 323 020	57 024 620
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	280 738 071	297 806 282
B.	Pembiayaan Daerah	145 744 703	85 380 519
Jumlah		1 434 782 362	1 454 867 000

*) Data APBD

Tabel 16 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Purworejo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	837 532 224	991 713 206
1. Belanja Pegawai	773 569 085	894 629 145
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	5 156 490	12 106 160
5. Belanja Bantuan Sosial	8 185 000	864 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	11 305 866
7. Belanja Bantuan Keuangan	50 512 649	64 653 342
8. Pengeluaran Tidak Terduga	109 000	8 154 693
B. Belanja Langsung	367 330 422	454 809 054
1. Belanja Pegawai	43 166 261	37 826 961
2. Belanja Barang dan Jasa	143 309 976	198 399 731
3. Belanja Modal	180 854 185	218 582 362
C. Pembiayaan Daerah	229 919 716	8 344 740
Jumlah	1 434 782 362	1 454 867 000

*) Data APBD

Tabel 17 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 144 182 522	1 196 068 805
1.	Pendapatan Asli Daerah	108 729 508	107 655 071
1.1.	Pajak Daerah	26 416 353	22 561 500
1.2.	Retribusi Daerah	19 024 710	34 153 681
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 129 820	5 653 860
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	57 158 625	45 286 030
2.	Dana Perimbangan	758 139 019	807 748 019
2.1.	Bagi Hasil Pajak	25 300 216	16 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	9 340 589	8 080 000
2.3.	Dana Alokasi Umum	665 548 034	724 245 009
2.4.	Dana Alokasi Khusus	57 950 180	59 423 010
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	277 313 995	280 665 715
B.	Pembiayaan Daerah	156 079 075	173 468 691
Jumlah		1 300 261 597	1 369 537 496
*) <i>Data APBD</i>			

Tabel 18 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	657 244 354	757 734 609
1. Belanja Pegawai	587 856 934	670 440 859
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	15 153 120	27 799 750
5. Belanja Bantuan Sosial	3 023 600	3 134 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	49 362 126	53 860 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 848 574	2 500 000
B. Belanja Langsung	330 859 418	593 802 887
1. Belanja Pegawai	10 250 814	13 518 489
2. Belanja Barang dan Jasa	182 413 506	262 180 478
3. Belanja Modal	138 195 098	318 103 920
C. Pembiayaan Daerah	312 157 825	18 000 000
Jumlah	1 300 261 597	1 369 537 496

*) Data APBD

Tabel 19 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 428 243 260	1 464 759 999
1.	Pendapatan Asli Daerah	173 253 652	134 569 004
1.1.	Pajak Daerah	70 672 601	49 940 130
1.2.	Retribusi Daerah	28 689 460	31 818 056
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10 740 005	10 293 396
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	63 151 586	42 517 422
2.	Dana Perimbangan	986 615 535	1 066 678 495
2.1.	Bagi Hasil Pajak	43 139 932	35 705 818
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	851 011	866 760
2.3.	Dana Alokasi Umum	899 528 369	965 124 427
2.4.	Dana Alokasi Khusus	43 096 223	64 981 490
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	268 374 073	263 512 500
B.	Pembiayaan Daerah	316 131 494	415 782 754
Jumlah		1 744 374 754	1 880 542 753

*) Data APBD

Tabel 20 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Magelang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	922 063 006	1 091 959 588
1. Belanja Pegawai	784 342 961	940 946 265
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	51 243 819	25 729 152
5. Belanja Bantuan Sosial	6 400 095	6 830 600
6. Belanja Bagi Hasil	1 314 200	1 314 494
7. Belanja Bantuan Keuangan	78 096 809	92 079 878
8. Pengeluaran Tidak Terduga	665 122	25 059 199
B. Belanja Langsung	336 092 345	732 783 635
1. Belanja Pegawai	42 663 365	38 007 997
2. Belanja Barang dan Jasa	184 825 356	313 662 405
3. Belanja Modal	108 603 624	381 113 233
C. Pembiayaan Daerah	486 219 403	55 799 530
Jumlah	1 744 374 754	1 880 542 753

*) Data APBD

Tabel 21 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 463 130 392	1 569 313 584
1.	Pendapatan Asli Daerah	160 752 450	181 450 406
1.1.	Pajak Daerah	43 467 756	41 540 200
1.2.	Retribusi Daerah	41 482 304	60 152 953
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 425 252	9 422 076
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	69 377 138	70 335 177
2.	Dana Perimbangan	968 601 409	1 059 244 080
2.1.	Bagi Hasil Pajak	36 588 748	33 913 080
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 093 180	1 014 824
2.3.	Dana Alokasi Umum	871 685 981	943 220 456
2.4.	Dana Alokasi Khusus	59 233 500	81 095 720
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	333 776 533	328 619 098
B.	Pembiayaan Daerah	84 573 452	66 725 322
Jumlah		1 547 703 844	1 636 038 906

*) Data APBD

Tabel 22 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	970 527 560	1 076 090 646
1. Belanja Pegawai	837 599 339	922 655 997
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	60 237 527	64 947 285
5. Belanja Bantuan Sosial	3 292 630	3 437 500
6. Belanja Bagi Hasil	94 216	94 351
7. Belanja Bantuan Keuangan	69 303 848	82 955 513
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	451 303 401	548 210 260
1. Belanja Pegawai	27 784 148	35 108 963
2. Belanja Barang dan Jasa	174 407 527	210 625 149
3. Belanja Modal	249 111 726	302 476 148
C. Pembiayaan Daerah	125 872 883	11 738 000
Jumlah	1 547 703 844	1 636 038 906
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 23 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Klaten Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 735 589 679	1 785 998 473
1.	Pendapatan Asli Daerah	115 441 420	100 379 375
1.1.	Pajak Daerah	52 818 647	43 590 500
1.2.	Retribusi Daerah	21 631 992	24 079 273
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 586 866	5 848 602
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	35 403 915	26 861 000
2.	Dana Perimbangan	1 174 619 196	1 244 798 376
2.1.	Bagi Hasil Pajak	30 890 435	20 870 290
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16 234 914	14 765 078
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 066 318 427	1 142 586 588
2.4.	Dana Alokasi Khusus	61 175 420	66 576 420
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	445 529 063	440 820 722
B.	Pembiayaan Daerah	164 527 643	81 782 207
Jumlah		1 900 117 322	1 867 780 680
*) Data APBD			

Tabel 24 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Klaten
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 231 648 344	1 371 521 209
1. Belanja Pegawai	1 067 791 179	1 204 428 852
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	22 051 956	20 489 810
5. Belanja Bantuan Sosial	11 255 817	14 571 485
6. Belanja Bagi Hasil	468 086	651 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	128 767 165	128 679 250
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 314 141	2 700 812
B. Belanja Langsung	389 954 063	480 259 471
1. Belanja Pegawai	22 524 866	27 121 812
2. Belanja Barang dan Jasa	180 545 654	196 431 470
3. Belanja Modal	186 883 543	256 706 189
C. Pembiayaan Daerah	278 514 915	16 000 000
Jumlah	1 900 117 322	1 867 780 680

*) Data APBD

Tabel 25 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 365 641 177	1 385 908 081
1.	Pendapatan Asli Daerah	192 971 720	179 166 738
1.1.	Pajak Daerah	102 524 770	85 730 000
1.2.	Retribusi Daerah	21 834 054	35 435 487
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 357 189	5 047 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	60 255 707	52 954 251
2.	Dana Perimbangan	844 525 645	915 548 527
2.1.	Bagi Hasil Pajak	17 115 157	28 106 944
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	10 822 908	3 645 622
2.3.	Dana Alokasi Umum	763 462 900	826 891 481
2.4.	Dana Alokasi Khusus	53 124 680	56 904 480
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	328 143 812	291 192 816
B.	Pembiayaan Daerah	134 349 846	90 660 714
Jumlah		1 499 991 023	1 476 568 795

*) Data APBD

Tabel 26 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	841 323 571	956 028 564
1. Belanja Pegawai	720 644 842	839 308 676
2. Belanja Bunga	35 857	24 832
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	48 520 253	38 304 295
5. Belanja Bantuan Sosial	16 297 614	14 430 500
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	52 862 366	51 236 711
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 962 639	12 723 550
B. Belanja Langsung	440 324 540	510 907 678
1. Belanja Pegawai	69 426 531	83 822 876
2. Belanja Barang dan Jasa	161 206 645	213 471 009
3. Belanja Modal	209 691 364	213 613 793
C. Pembiayaan Daerah	218 342 912	9 632 553
Jumlah	1 499 991 023	1 476 568 795

*) Data APBD

Tabel 27 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 489 307 552	1 538 389 925
1.	Pendapatan Asli Daerah	111 592 606	140 193 086
1.1.	Pajak Daerah	14 589 776	23 073 636
1.2.	Retribusi Daerah	21 211 387	43 714 543
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 914 076	8 498 407
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	67 877 367	64 906 500
2.	Dana Perimbangan	1 039 362 677	1 091 689 304
2.1.	Bagi Hasil Pajak	45 130 741	29 916 445
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 049 489	1 002 300
2.3.	Dana Alokasi Umum	917 476 557	1 001 378 439
2.4.	Dana Alokasi Khusus	75 705 890	59 392 120
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	338 352 269	306 507 535
B.	Pembiayaan Daerah	152 050 276	96 425 489
Jumlah		1 641 357 828	1 634 815 414
*) Data APBD			

Tabel 28 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 027 942 348	1 145 036 773
1. Belanja Pegawai	904 174 086	1 023 418 344
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	80 271	611 804
4. Belanja Hibah	18 525 438	11 878 450
5. Belanja Bantuan Sosial	4 278 000	2 900 000
6. Belanja Bagi Hasil	24 488 456	34 955 685
7. Belanja Bantuan Keuangan	72 922 990	70 272 490
8. Pengeluaran Tidak Terduga	3 473 107	1 000 000
B. Belanja Langsung	421 303 100	478 913 641
1. Belanja Pegawai	38 613 344	46 577 578
2. Belanja Barang dan Jasa	190 640 953	241 993 075
3. Belanja Modal	192 048 803	190 342 988
C. Pembiayaan Daerah	192 112 380	10 865 000
Jumlah	1 641 357 828	1 634 815 414

*) Data APBD

Tabel 29 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 369 051 825	1 466 049 795
1.	Pendapatan Asli Daerah	161 715 928	143 021 955
1.1.	Pajak Daerah	77 015 249	54 995 000
1.2.	Retribusi Daerah	20 874 824	33 748 446
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 603 188	9 209 556
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	56 222 667	45 068 953
2.	Dana Perimbangan	900 707 521	939 150 975
2.1.	Bagi Hasil Pajak	27 059 175	6 300 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 228 704	5 610 513
2.3.	Dana Alokasi Umum	810 216 582	870 001 752
2.4.	Dana Alokasi Khusus	55 203 060	57 238 710
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	306 628 376	383 876 865
B.	Pembiayaan Daerah	176 017 192	198 124 823
Jumlah		1 545 069 017	1 664 174 618
*) <i>Data APBD</i>			

Tabel 30 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	951 048 966	1 167 034 843
1. Belanja Pegawai	807 862 149	1 002 354 198
2. Belanja Bunga	20 165	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	89 275 435	87 413 231
5. Belanja Bantuan Sosial	7 755 700	9 795 000
6. Belanja Bagi Hasil	1 999 932	2 000 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	44 130 400	62 972 414
8. Pengeluaran Tidak Terduga	5 185	2 500 000
B. Belanja Langsung	336 114 798	490 398 775
1. Belanja Pegawai	49 601 201	29 001 900
2. Belanja Barang dan Jasa	138 034 853	254 809 209
3. Belanja Modal	148 478 744	206 587 666
C. Pembiayaan Daerah	257 905 253	6 741 000
Jumlah	1 545 069 017	1 664 174 618

*) *Data APBD*

Tabel 31 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 468 966 589	1 533 876 935
1.	Pendapatan Asli Daerah	146 721 552	137 995 951
1.1.	Pajak Daerah	28 585 227	35 850 418
1.2.	Retribusi Daerah	28 533 334	26 800 265
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 884 947	8 513 658
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	81 718 044	66 831 610
2.	Dana Perimbangan	974 779 879	1 047 910 910
2.1.	Bagi Hasil Pajak	42 909 669	23 766 786
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	857 105	848 183
2.3.	Dana Alokasi Umum	869 155 545	946 826 641
2.4.	Dana Alokasi Khusus	61 857 560	76 469 300
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	347 465 158	347 970 074
B.	Pembiayaan Daerah	192 948 551	54 223 562
Jumlah		1 661 915 140	1 588 100 497

*) Data APBD

Tabel 32 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sragen Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 002 207 022	1 088 640 174
1. Belanja Pegawai	855 828 610	968 928 779
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	58 402 461	42 495 502
5. Belanja Bantuan Sosial	26 448 300	17 185 150
6. Belanja Bagi Hasil	861 644	1 382 100
7. Belanja Bantuan Keuangan	60 649 941	56 144 384
8. Pengeluaran Tidak Terduga	16 066	2 504 259
B. Belanja Langsung	406 388 364	484 460 323
1. Belanja Pegawai	22 500 555	25 835 901
2. Belanja Barang dan Jasa	242 624 083	238 872 895
3. Belanja Modal	141 263 726	219 751 527
C. Pembiayaan Daerah	253 319 754	15 000 000
Jumlah	1 661 915 140	1 588 100 497

*) *Data APBD*

Tabel 33 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 549 709 105	1 589 302 250
1.	Pendapatan Asli Daerah	143 586 364	172 171 998
1.1.	Pajak Daerah	42 622 517	34 887 500
1.2.	Retribusi Daerah	13 579 063	61 296 187
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11 471 524	8 320 724
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	75 913 260	67 667 587
2.	Dana Perimbangan	1 074 895 579	1 105 254 457
2.1.	Bagi Hasil Pajak	62 390 180	34 309 197
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 534 594	7 431 058
2.3.	Dana Alokasi Umum	906 666 365	977 675 512
2.4.	Dana Alokasi Khusus	104 304 440	85 838 690
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	331 227 162	311 875 795
B.	Pembiayaan Daerah	141 123 083	56 422 767
Jumlah		1 690 832 188	1 645 725 017

*) Data APBD

Tabel 34 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Grobogan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	845 032 780	959 632 383
1. Belanja Pegawai	774 438 503	846 718 799
2. Belanja Bunga	35 960	47 179
3. Belanja Subsidi	428 500	428 500
4. Belanja Hibah	20 611 994	19 495 250
5. Belanja Bantuan Sosial	12 807 410	9 249 671
6. Belanja Bagi Hasil	2 440 420	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	33 911 413	82 192 984
8. Pengeluaran Tidak Terduga	358 580	1 500 000
B. Belanja Langsung	662 916 422	670 155 478
1. Belanja Pegawai	42 425 672	43 325 210
2. Belanja Barang dan Jasa	267 416 546	330 334 235
3. Belanja Modal	353 074 204	296 496 033
C. Pembiayaan Daerah	182 882 986	15 937 156
Jumlah	1 690 832 188	1 645 725 017

*) Data APBD

Tabel 35 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 292 524 291	1 468 698 269
1.	Pendapatan Asli Daerah	94 917 908	119 769 424
1.1.	Pajak Daerah	15 330 017	22 503 933
1.2.	Retribusi Daerah	11 847 745	14 915 233
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 165 994	7 679 262
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	61 574 152	74 670 996
2.	Dana Perimbangan	901 824 680	978 739 822
2.1.	Bagi Hasil Pajak	77 641 231	77 460 903
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16 860 523	16 264 170
2.3.	Dana Alokasi Umum	753 830 036	823 874 089
2.4.	Dana Alokasi Khusus	53 492 890	61 140 660
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	295 781 703	370 189 023
B.	Pembiayaan Daerah	151 160 979	125 626 297
Jumlah		1 443 685 270	1 594 324 566

*) Data APBD

Tabel 36 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	857 836 310	982 207 741
1. Belanja Pegawai	719 203 560	871 209 811
2. Belanja Bunga	41 044	15 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	52 420 935	45 426 430
5. Belanja Bantuan Sosial	4 199 500	3 991 500
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	81 971 271	61 065 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	500 000
B. Belanja Langsung	460 647 744	606 446 125
1. Belanja Pegawai	59 669 297	77 369 171
2. Belanja Barang dan Jasa	140 523 046	178 832 278
3. Belanja Modal	260 455 401	350 244 676
C. Pembiayaan Daerah	125 201 216	5 670 700
Jumlah	1 443 685 270	1 594 324 566
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 37 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Rembang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 165 432 976	1 211 845 937
1.	Pendapatan Asli Daerah	126 808 084	139 991 163
1.1.	Pajak Daerah	34 067 852	31 217 000
1.2.	Retribusi Daerah	30 924 103	29 894 110
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 277 635	3 683 275
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	58 538 494	75 196 778
2.	Dana Perimbangan	716 783 684	791 922 055
2.1.	Bagi Hasil Pajak	32 706 414	27 639 230
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 705 000	1 900 104
2.3.	Dana Alokasi Umum	640 273 360	700 774 721
2.4.	Dana Alokasi Khusus	42 098 910	61 608 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	321 841 208	279 932 719
B.	Pembiayaan Daerah	67 555 129	124 395 745
Jumlah		1 232 988 105	1 336 241 682
*) <i>Data APBD</i>			

Tabel 38 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Rembang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	653 614 911	767 567 955
1. Belanja Pegawai	575 865 496	694 987 479
2. Belanja Bunga	20 708	37 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	42 862 477	31 820 751
5. Belanja Bantuan Sosial	1 800 500	4 354 525
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	32 688 825	35 368 200
8. Pengeluaran Tidak Terduga	376 905	1 000 000
B. Belanja Langsung	407 033 527	565 263 727
1. Belanja Pegawai	57 992 914	77 406 176
2. Belanja Barang dan Jasa	213 592 816	297 858 516
3. Belanja Modal	135 447 797	189 999 035
C. Pembiayaan Daerah	172 339 667	3 410 000
Jumlah	1 232 988 105	1 336 241 682
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 39 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pati Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 706 030 890	1 725 390 179
1.	Pendapatan Asli Daerah	169 127 416	173 223 183
1.1.	Pajak Daerah	29 451 245	43 480 000
1.2.	Retribusi Daerah	31 119 228	31 347 398
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 823 940	6 500 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	101 733 003	91 895 785
2.	Dana Perimbangan	1 094 864 465	1 158 252 397
2.1.	Bagi Hasil Pajak	60 316 824	33 908 540
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 164 945	992 872
2.3.	Dana Alokasi Umum	960 479 326	1 043 498 355
2.4.	Dana Alokasi Khusus	72 903 370	79 852 630
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	442 039 009	393 914 599
B.	Pembiayaan Daerah	205 551 831	146 239 767
Jumlah		1 911 582 721	1 871 629 946
*) <i>Data APBD</i>			

Tabel 40 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pati
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 072 253 204	1 191 796 151
1. Belanja Pegawai	919 483 122	1 039 046 920
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	54 893 391	42 367 020
5. Belanja Bantuan Sosial	6 069 820	6 609 550
6. Belanja Bagi Hasil	3 532 369	4 367 917
7. Belanja Bantuan Keuangan	88 244 502	96 248 794
8. Pengeluaran Tidak Terduga	30 000	3 155 950
B. Belanja Langsung	580 768 289	675 417 795
1. Belanja Pegawai	47 963 046	29 976 663
2. Belanja Barang dan Jasa	329 330 799	394 224 399
3. Belanja Modal	203 474 444	251 216 733
C. Pembiayaan Daerah	258 561 228	4 416 000
Jumlah	1 911 582 721	1 871 629 946

*) Data APBD

Tabel 41 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kudus Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 386 183 085	1 517 236 814
1. Pendapatan Asli Daerah	144 995 092	168 382 095
1.1. Pajak Daerah	58 194 213	56 772 180
1.2. Retribusi Daerah	15 588 523	35 256 083
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 318 220	4 723 796
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	66 894 136	71 630 036
2. Dana Perimbangan	954 512 785	1 010 417 213
2.1. Bagi Hasil Pajak	70 224 840	68 306 254
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	112 672 130	91 070 208
2.3. Dana Alokasi Umum	719 406 935	795 851 851
2.4. Dana Alokasi Khusus	52 208 880	55 188 900
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	286 675 208	338 437 506
B. Pembiayaan Daerah	99 282 823	218 473 981
Jumlah	1 485 465 908	1 735 710 795

*) Data APBD

Tabel 42 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kudus
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	738 734 501	947 813 401
1. Belanja Pegawai	647 389 397	815 347 426
2. Belanja Bunga	44 378	70 802
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	25 607 572	46 029 515
5. Belanja Bantuan Sosial	24 098 659	32 371 987
6. Belanja Bagi Hasil	4 319 038	6 181 567
7. Belanja Bantuan Keuangan	37 271 465	44 812 104
8. Pengeluaran Tidak Terduga	3 992	3 000 000
B. Belanja Langsung	416 756 114	729 782 394
1. Belanja Pegawai	26 370 693	32 937 924
2. Belanja Barang dan Jasa	257 412 961	416 169 617
3. Belanja Modal	132 972 460	280 674 853
C. Pembiayaan Daerah	329 975 293	58 115 000
Jumlah	1 485 465 908	1 735 710 795

*) Data APBD

Tabel 43 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 386 691 762	1 484 144 592
1. Pendapatan Asli Daerah	133 778 055	182 092 319
1.1. Pajak Daerah	29 069 102	40 852 060
1.2. Retribusi Daerah	21 188 868	13 917 826
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 728 455	9 327 608
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	77 791 630	117 994 825
2. Dana Perimbangan	938 844 273	1 013 014 157
2.1. Bagi Hasil Pajak	55 948 152	37 856 978
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 028 427	6 094 375
2.3. Dana Alokasi Umum	814 380 324	887 768 694
2.4. Dana Alokasi Khusus	67 487 370	81 294 110
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	314 069 434	289 038 116
B. Pembiayaan Daerah	107 352 157	129 919 973
Jumlah	1 494 043 919	1 614 064 565
*) Data APBD		

Tabel 44 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Jepara
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	799 133 036	876 679 139
1. Belanja Pegawai	710 553 046	769 043 747
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	234 077	234 085
4. Belanja Hibah	32 436 280	41 239 500
5. Belanja Bantuan Sosial	5 601 358	9 272 240
6. Belanja Bagi Hasil	3 014 598	3 785 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	46 495 342	51 904 567
8. Pengeluaran Tidak Terduga	798 335	1 200 000
B. Belanja Langsung	553 196 202	727 484 426
1. Belanja Pegawai	19 678 080	21 123 667
2. Belanja Barang dan Jasa	374 719 274	512 704 354
3. Belanja Modal	158 798 848	193 656 405
C. Pembiayaan Daerah	141 714 681	9 901 000
Jumlah	1 494 043 919	1 614 064 565

*) Data APBD

Tabel 45 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Demak Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 398 722 359	1 361 270 830
1. Pendapatan Asli Daerah	138 214 446	158 654 138
1.1. Pajak Daerah	57 616 249	47 878 345
1.2. Retribusi Daerah	17 345 223	41 559 293
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 704 846	7 755 000
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	57 548 128	61 461 500
2. Dana Perimbangan	876 058 673	920 067 580
2.1. Bagi Hasil Pajak	45 757 331	35 219 401
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15 833 505	14 373 761
2.3. Dana Alokasi Umum	737 911 647	795 874 748
2.4. Dana Alokasi Khusus	76 556 190	74 599 670
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	384 449 240	282 549 112
B. Pembiayaan Daerah	111 426 786	71 223 657
Jumlah	1 510 149 145	1 432 494 487

*) Data APBD

Tabel 46 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Demak
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	768 124 368	843 861 594
1. Belanja Pegawai	607 577 594	695 461 259
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	100 448 145	82 866 810
5. Belanja Bantuan Sosial	3 451 490	4 224 025
6. Belanja Bagi Hasil	229 813	1 072 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	56 219 166	58 237 500
8. Pengeluaran Tidak Terduga	198 160	2 000 000
B. Belanja Langsung	570 293 557	581 582 893
1. Belanja Pegawai	35 684 358	48 915 865
2. Belanja Barang dan Jasa	182 299 311	227 860 652
3. Belanja Modal	352 309 888	304 806 376
C. Pembiayaan Daerah	171 731 220	7 050 000
Jumlah	1 510 149 145	1 432 494 487

*) Data APBD

Tabel 47 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Semarang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 373 383 023	1 232 101 818
1.	Pendapatan Asli Daerah	215 679 554	211 839 753
1.1.	Pajak Daerah	82 603 475	76 779 729
1.2.	Retribusi Daerah	28 353 829	45 722 231
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 193 157	8 402 497
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	96 529 093	80 935 296
2.	Dana Perimbangan	879 109 713	954 036 301
2.1.	Bagi Hasil Pajak	40 510 078	37 031 014
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	881 245	861 937
2.3.	Dana Alokasi Umum	778 604 920	848 736 010
2.4.	Dana Alokasi Khusus	59 113 470	67 407 340
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	278 593 756	66 225 764
B.	Pembiayaan Daerah	125 954 445	22 716 835
Jumlah		1 499 337 468	1 254 818 653
*) Data APBD			

Tabel 48 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Semarang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	803 779 368	668 439 864
1. Belanja Pegawai	709 552 104	599 670 820
2. Belanja Bunga	5 652	3 520
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	34 158 866	4 206 000
5. Belanja Bantuan Sosial	6 730 575	5 505 750
6. Belanja Bagi Hasil	172 225	172 225
7. Belanja Bantuan Keuangan	50 670 337	56 881 549
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 489 609	2 000 000
B. Belanja Langsung	529 758 415	582 861 522
1. Belanja Pegawai	34 181 869	24 880 620
2. Belanja Barang dan Jasa	267 992 167	309 756 840
3. Belanja Modal	227 584 379	248 224 062
C. Pembiayaan Daerah	165 799 685	3 517 267
Jumlah	1 499 337 468	1 254 818 653

*) Data APBD

Tabel 49 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 053 845 573	1 094 286 244
1.	Pendapatan Asli Daerah	102 080 198	98 995 825
1.1.	Pajak Daerah	25 583 571	23 867 000
1.2.	Retribusi Daerah	15 480 551	24 845 905
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11 287 251	9 640 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	49 728 825	40 642 920
2.	Dana Perimbangan	743 027 753	777 341 769
2.1.	Bagi Hasil Pajak	23 225 082	27 000 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27 003 377	21 568 127
2.3.	Dana Alokasi Umum	651 171 674	681 657 500
2.4.	Dana Alokasi Khusus	41 627 620	47 116 142
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	208 737 622	217 948 650
B.	Pembiayaan Daerah	59 438 956	95 522 418
Jumlah		1 113 284 529	1 189 808 662

*) Data APBD

Tabel 50 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Temanggung Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	713 737 923	749 849 923
1. Belanja Pegawai	573 983 834	633 951 084
2. Belanja Bunga	1 352 612	2 000 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	58 141 920	49 199 340
5. Belanja Bantuan Sosial	29 564 076	18 090 380
6. Belanja Bagi Hasil	4 316 726	4 504 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	46 156 911	41 605 119
8. Pengeluaran Tidak Terduga	221 844	500 000
B. Belanja Langsung	287 103 302	431 458 739
1. Belanja Pegawai	36 481 808	38 422 913
2. Belanja Barang dan Jasa	146 815 986	150 123 651
3. Belanja Modal	103 805 508	242 912 175
C. Pembiayaan Daerah	112 443 304	8 500 000
Jumlah	1 113 284 529	1 189 808 662

*) Data APBD

Tabel 51 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Kendal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 388 635 846	1 456 424 603
1.	Pendapatan Asli Daerah	136 029 703	155 567 388
1.1.	Pajak Daerah	38 400 391	47 832 000
1.2.	Retribusi Daerah	18 592 267	45 256 380
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 973 767	6 583 866
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	70 063 278	55 895 142
2.	Dana Perimbangan	910 086 714	977 008 486
2.1.	Bagi Hasil Pajak	78 731 468	59 304 662
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 289 678	1 684 155
2.3.	Dana Alokasi Umum	788 134 078	852 170 849
2.4.	Dana Alokasi Khusus	41 931 490	63 848 820
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	342 519 429	323 848 729
B.	Pembiayaan Daerah	141 033 449	132 319 730
Jumlah		1 529 669 295	1 588 744 333

*) Data APBD

Tabel 52 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kendal
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	846 159 425	878 500 178
1. Belanja Pegawai	719 808 167	807 833 903
2. Belanja Bunga	67 810 652	175 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	5 940 202	8 200 897
5. Belanja Bantuan Sosial	6 017 886	4 048 700
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	46 582 518	54 741 678
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	3 500 000
B. Belanja Langsung	490 506 850	696 024 942
1. Belanja Pegawai	59 199 099	40 027 705
2. Belanja Barang dan Jasa	275 908 850	382 851 707
3. Belanja Modal	155 398 901	273 145 530
C. Pembiayaan Daerah	193 003 020	14 219 213
Jumlah	1 529 669 295	1 588 744 333

*) *Data APBD*

Tabel 53 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Batang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1 086 627 383	1 062 961 099
1. Pendapatan Asli Daerah	143 502 571	108 938 221
1.1. Pajak Daerah	40 333 093	29 789 500
1.2. Retribusi Daerah	35 812 498	16 567 710
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 647 941	5 479 611
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	61 709 039	57 101 400
2. Dana Perimbangan	727 548 570	767 642 947
2.1. Bagi Hasil Pajak	27 951 001	25 720 760
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	8 141 499	7 562 693
2.3. Dana Alokasi Umum	641 663 630	682 182 894
2.4. Dana Alokasi Khusus	49 792 440	52 176 600
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	215 576 242	186 379 931
B. Pembiayaan Daerah	132 532 413	73 021 748
Jumlah	1 219 159 796	1 135 982 847

*) Data APBD

Tabel 54 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Batang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	661 905 861	668 831 948
1. Belanja Pegawai	547 648 556	576 567 244
2. Belanja Bunga	62 959	358 236
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	26 446 874	19 969 926
5. Belanja Bantuan Sosial	50 049 360	29 345 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	36 807 351	40 591 542
8. Pengeluaran Tidak Terduga	890 761	2 000 000
B. Belanja Langsung	405 506 814	460 988 392
1. Belanja Pegawai	67 177 172	68 029 658
2. Belanja Barang dan Jasa	190 063 172	210 689 101
3. Belanja Modal	148 266 470	182 269 633
C. Pembiayaan Daerah	151 747 121	6 162 507
Jumlah	1 219 159 796	1 135 982 847

*) Data APBD

Tabel 55 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 238 086 251	1 296 436 254
1.	Pendapatan Asli Daerah	148 496 886	153 761 074
1.1.	Pajak Daerah	28 688 219	26 774 441
1.2.	Retribusi Daerah	12 628 888	11 929 036
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 275 738	2 801 682
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	104 904 041	112 255 915
2.	Dana Perimbangan	856 476 945	921 439 886
2.1.	Bagi Hasil Pajak	26 509 469	28 611 683
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	879 769	868 253
2.3.	Dana Alokasi Umum	768 500 117	831 579 000
2.4.	Dana Alokasi Khusus	60 587 590	60 380 950
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	233 112 420	221 235 294
B.	Pembiayaan Daerah	106 173 076	15 427 932
Jumlah		1 344 259 327	1 311 864 186

*) Data APBD

Tabel 56 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	769 716 296	792 809 786
1. Belanja Pegawai	699 929 103	746 419 590
2. Belanja Bunga	67 259	67 260
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	12 674 500	6 047 000
5. Belanja Bantuan Sosial	9 243 350	5 260 550
6. Belanja Bagi Hasil	42 277	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	44 138 725	33 015 386
8. Pengeluaran Tidak Terduga	3 621 082	2 000 000
B. Belanja Langsung	497 634 389	512 376 995
1. Belanja Pegawai	27 969 585	56 083 172
2. Belanja Barang dan Jasa	285 344 580	249 063 006
3. Belanja Modal	184 320 224	207 230 817
C. Pembiayaan Daerah	76 908 642	6 677 405
Jumlah	1 344 259 327	1 311 864 186

*) Data APBD

Tabel 57 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 486 773 784	1 499 600 982
1.	Pendapatan Asli Daerah	136 362 282	117 133 686
1.1.	Pajak Daerah	34 447 512	35 949 000
1.2.	Retribusi Daerah	24 072 977	20 307 000
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9 903 251	11 691 504
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	67 938 542	49 186 182
2.	Dana Perimbangan	1 029 201 574	1 113 470 073
2.1.	Bagi Hasil Pajak	32 869 676	23 200 000
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 400 332	1 432 000
2.3.	Dana Alokasi Umum	931 426 998	1 016 813 333
2.4.	Dana Alokasi Khusus	63 504 568	72 024 740
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	321 209 928	268 997 223
B.	Pembiayaan Daerah	200 810 506	53 723 172
Jumlah		1 687 584 290	1 553 324 154
*) Data APBD			

Tabel 58 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	947 855 203	1 056 167 221
1. Belanja Pegawai	820 751 058	916 101 614
2. Belanja Bunga	84 583	128 044
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	44 882 857	33 398 649
5. Belanja Bantuan Sosial	15 584 850	21 992 500
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	65 840 167	82 946 414
8. Pengeluaran Tidak Terduga	711 688	1 600 000
B. Belanja Langsung	529 250 828	477 929 679
1. Belanja Pegawai	52 894 902	50 307 590
2. Belanja Barang dan Jasa	226 379 906	257 134 207
3. Belanja Modal	249 976 020	170 487 882
C. Pembiayaan Daerah	210 478 259	19 227 254
Jumlah	1 687 584 290	1 553 324 154

*) Data APBD

Tabel 59 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 542 068 555	1 708 553 904
1.	Pendapatan Asli Daerah	156 244 860	180 429 994
1.1.	Pajak Daerah	48 221 943	50 606 822
1.2.	Retribusi Daerah	24 410 427	55 549 539
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 946 669	6 571 628
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	78 665 821	67 702 005
2.	Dana Perimbangan	1 039 845 030	1 166 227 022
2.1.	Bagi Hasil Pajak	34 281 092	29 963 326
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 462 724	7 189 956
2.3.	Dana Alokasi Umum	925 576 304	1 044 211 310
2.4.	Dana Alokasi Khusus	72 524 910	84 862 430
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	345 978 665	361 896 888
B.	Pembiayaan Daerah	127 206 164	61 739 911
Jumlah		1 669 274 719	1 770 293 815
*) Data APBD			

Tabel 60 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	974 109 050	1 075 049 771
1. Belanja Pegawai	867 972 719	964 540 272
2. Belanja Bunga	38 837	60 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	46 831 172	17 581 700
5. Belanja Bantuan Sosial	9 606 650	15 733 800
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	46 870 358	73 133 999
8. Pengeluaran Tidak Terduga	2 789 314	4 000 000
B. Belanja Langsung	557 753 373	688 796 356
1. Belanja Pegawai	37 207 592	50 325 121
2. Belanja Barang dan Jasa	304 570 712	340 141 751
3. Belanja Modal	215 975 069	298 329 484
C. Pembiayaan Daerah	137 412 296	6 447 688
Jumlah	1 669 274 719	1 770 293 815

*) *Data APBD*

Tabel 61 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Brebes
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 783 092 344	1 797 514 283
1.	Pendapatan Asli Daerah	135 055 401	153 413 784
1.1.	Pajak Daerah	31 181 332	49 505 900
1.2.	Retribusi Daerah	23 584 300	23 152 347
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 036 219	3 275 678
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	77 253 550	77 479 859
2.	Dana Perimbangan	1 248 282 455	1 321 901 167
2.1.	Bagi Hasil Pajak	65 451 436	35 585 581
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 202 609	1 370 431
2.3.	Dana Alokasi Umum	1 098 999 510	1 186 969 845
2.4.	Dana Alokasi Khusus	82 628 900	97 975 310
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	399 754 488	322 199 332
B.	Pembiayaan Daerah	268 093 002	153 609 912
Jumlah		2 051 185 346	1 951 124 195
*) Data APBD			

Tabel 62 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Brebes
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 025 012 111	1 217 402 470
1. Belanja Pegawai	915 924 453	1 091 134 863
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	23 628 424	27 359 850
5. Belanja Bantuan Sosial	11 227 947	22 031 969
6. Belanja Bagi Hasil	235 149	300 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	69 192 870	71 550 627
8. Pengeluaran Tidak Terduga	4 803 268	5 025 161
B. Belanja Langsung	636 254 092	729 298 225
1. Belanja Pegawai	44 537 111	38 081 075
2. Belanja Barang dan Jasa	265 906 208	436 671 521
3. Belanja Modal	325 810 773	254 545 629
C. Pembiayaan Daerah	389 919 143	4 423 500
Jumlah	2 051 185 346	1 951 124 195

*) Data APBD

Tabel 63 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	634 759 985	658 206 151
1.	Pendapatan Asli Daerah	107 739 839	98 314 096
1.1.	Pajak Daerah	18 829 673	14 138 700
1.2.	Retribusi Daerah	7 357 208	5 051 863
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5 872 500	5 341 554
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	75 680 458	73 781 979
2.	Dana Perimbangan	431 113 288	471 352 004
2.1.	Bagi Hasil Pajak	23 760 434	19 137 568
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	849 126	793 117
2.3.	Dana Alokasi Umum	385 859 241	417 211 449
2.4.	Dana Alokasi Khusus	20 644 487	34 209 870
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	95 906 858	88 540 051
B.	Pembiayaan Daerah	112 323 083	39 370 000
Jumlah		747 083 068	697 576 151

*) Data APBD

Tabel 64 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	312 621 939	362 361 992
1. Belanja Pegawai	303 666 266	348 316 778
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	5 257 082	3 256 127
5. Belanja Bantuan Sosial	3 431 286	3 193 873
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	0	0
8. Pengeluaran Tidak Terduga	267 305	7 595 214
B. Belanja Langsung	318 228 778	327 599 023
1. Belanja Pegawai	42 164 663	29 281 231
2. Belanja Barang dan Jasa	133 475 605	176 608 654
3. Belanja Modal	142 588 510	121 709 138
C. Pembiayaan Daerah	116 232 351	7 615 136
Jumlah	747 083 068	697 576 151

*) Data APBD

Tabel 65 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	1 385 005 107	1 486 306 028
1.	Pendapatan Asli Daerah	298 400 847	297 026 865
1.1.	Pajak Daerah	193 906 211	192 504 724
1.2.	Retribusi Daerah	64 767 800	60 382 990
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 244 981	5 640 636
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	31 481 855	38 498 515
2.	Dana Perimbangan	750 066 766	809 408 752
2.1.	Bagi Hasil Pajak	50 418 852	47 988 655
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7 107 496	6 768 053
2.3.	Dana Alokasi Umum	659 647 382	710 803 934
2.4.	Dana Alokasi Khusus	32 893 036	43 848 110
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	336 537 494	379 870 411
B.	Pembiayaan Daerah	206 628 228	61 655 387
Jumlah		1 591 633 335	1 547 961 415
*) <i>Data APBD</i>			

Tabel 66 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	851 623 896	890 221 017
1. Belanja Pegawai	732 801 975	803 801 765
2. Belanja Bunga	3 011 104	795 923
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	114 277 841	81 892 813
5. Belanja Bantuan Sosial	197 933	1 040 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	690 515	690 516
8. Pengeluaran Tidak Terduga	644 528	2 000 000
B. Belanja Langsung	523 680 961	624 210 860
1. Belanja Pegawai	48 547 410	67 452 716
2. Belanja Barang dan Jasa	230 158 027	278 702 350
3. Belanja Modal	244 975 524	278 055 794
C. Pembiayaan Daerah	216 328 478	33 529 538
Jumlah	1 591 633 335	1 547 961 415

*) Data APBD

Tabel 67 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Salatiga
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	603 204 202	643 028 274
1.	Pendapatan Asli Daerah	106 100 451	92 131 839
1.1.	Pajak Daerah	24 383 336	25 400 000
1.2.	Retribusi Daerah	13 120 667	10 457 340
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 272 635	4 140 179
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	64 323 813	52 134 320
2.	Dana Perimbangan	403 863 968	450 465 060
2.1.	Bagi Hasil Pajak	27 724 214	18 479 244
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	849 127	845 423
2.3.	Dana Alokasi Umum	358 331 867	399 083 343
2.4.	Dana Alokasi Khusus	16 958 760	32 057 050
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	93 239 783	100 431 375
B.	Pembiayaan Daerah	136 033 402	126 682 163
Jumlah		739 237 604	769 710 437

*) Data APBD

Tabel 68 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Salatiga
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	322 953 118	381 425 339
1. Belanja Pegawai	301 808 243	359 975 174
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	19 062 817	17 250 165
5. Belanja Bantuan Sosial	1 234 885	800 000
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	832 716	900 000
8. Pengeluaran Tidak Terduga	14 457	2 500 000
B. Belanja Langsung	206 284 516	386 285 098
1. Belanja Pegawai	24 874 430	42 558 881
2. Belanja Barang dan Jasa	112 206 180	158 398 633
3. Belanja Modal	69 203 906	185 327 584
C. Pembiayaan Daerah	209 999 970	2 000 000
Jumlah	739 237 604	769 710 437

*) Data APBD

Tabel 69 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Semarang
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	2 796 570 727	2 496 077 336
1. Pendapatan Asli Daerah	925 919 311	819 742 241
1.1. Pajak Daerah	683 708 490	589 100 000
1.2. Retribusi Daerah	120 785 109	103 161 354
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7 650 779	7 989 867
1.4. Lain-lain PAD yang Sah	113 774 933	119 491 020
2. Dana Perimbangan	1 191 097 524	1 241 379 593
2.1. Bagi Hasil Pajak	120 223 608	97 100 000
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1 878 325	557 500
2.3. Dana Alokasi Umum	1 054 002 569	1 104 739 473
2.4. Dana Alokasi Khusus	14 993 022	38 982 620
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	679 553 892	434 955 502
B. Pembiayaan Daerah	635 457 570	439 512 738
Jumlah	3 432 028 297	2 935 590 074
*) <i>Data APBD</i>		

Tabel 70 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Semarang
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	1 189 315 029	1 232 353 426
1. Belanja Pegawai	1 142 988 542	1 173 074 336
2. Belanja Bunga	378 295	200 000
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	41 621 316	49 691 023
5. Belanja Bantuan Sosial	2 731 600	3 599 500
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	788 567	788 567
8. Pengeluaran Tidak Terduga	806 709	5 000 000
B. Belanja Langsung	1 284 175 580	1 677 796 734
1. Belanja Pegawai	147 891 489	128 527 334
2. Belanja Barang dan Jasa	545 272 679	745 175 643
3. Belanja Modal	591 011 412	804 093 757
C. Pembiayaan Daerah	958 537 688	25 439 914
Jumlah	3 432 028 297	2 935 590 074

*) *Data APBD*

Tabel 71 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	675 375 468	691 318 398
1.	Pendapatan Asli Daerah	114 252 439	104 202 720
1.1.	Pajak Daerah	38 018 395	34 182 000
1.2.	Retribusi Daerah	18 873 554	15 472 483
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 005 448	3 530 000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	53 355 042	51 018 237
2.	Dana Perimbangan	450 219 879	475 580 573
2.1.	Bagi Hasil Pajak	30 160 284	27 690 346
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	849 127	845 423
2.3.	Dana Alokasi Umum	384 489 368	412 871 094
2.4.	Dana Alokasi Khusus	34 721 100	34 173 710
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	110 903 150	111 535 105
B.	Pembiayaan Daerah	94 617 781	44 073 485
Jumlah		769 993 249	735 391 883
*) Data APBD			

Tabel 72 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Pekalongan Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	326 538 718	372 012 153
1. Belanja Pegawai	278 009 898	312 500 330
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	15 681 880	41 851 600
5. Belanja Bantuan Sosial	10 135 246	13 954 420
6. Belanja Bagi Hasil	0	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	21 162 192	580 803
8. Pengeluaran Tidak Terduga	1 549 502	3 125 000
B. Belanja Langsung	337 636 634	350 629 730
1. Belanja Pegawai	57 067 033	38 279 572
2. Belanja Barang dan Jasa	149 254 010	164 975 179
3. Belanja Modal	131 315 591	147 374 979
C. Pembiayaan Daerah	105 817 897	12 750 000
Jumlah	769 993 249	735 391 883

*) *Data APBD*

Tabel 73 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kota Tegal
Menurut Jenis Penerimaan (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Penerimaan		2013	2014*)
(1)		(2)	(3)
A.	Pendapatan Daerah	723 968 861	640 279 804
1.	Pendapatan Asli Daerah	176 377 335	166 143 023
1.1.	Pajak Daerah	41 068 022	36 188 427
1.2.	Retribusi Daerah	21 953 079	18 006 435
1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 080 042	2 080 042
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	111 276 192	109 868 119
2.	Dana Perimbangan	430 499 302	449 283 241
2.1.	Bagi Hasil Pajak	28 968 008	27 138 979
2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	849 126	833 376
2.3.	Dana Alokasi Umum	370 642 983	390 732 536
2.4.	Dana Alokasi Khusus	30 039 185	30 578 350
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	117 092 224	24 853 540
B.	Pembiayaan Daerah	77 387 437	80 390 832
Jumlah		801 356 298	720 670 636

*) Data APBD

Tabel 74 Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kota Tegal
Menurut Jenis Pengeluaran (ribu rupiah), 2013-2014

Jenis Pengeluaran	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)
A. Belanja Tidak Langsung	355 305 435	339 584 388
1. Belanja Pegawai	325 976 076	307 639 228
2. Belanja Bunga	141 736	98 154
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	10 704 605	15 235 625
5. Belanja Bantuan Sosial	17 947 008	14 075 370
6. Belanja Bagi Hasil	536 010	0
7. Belanja Bantuan Keuangan	0	536 011
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
B. Belanja Langsung	317 734 707	368 923 404
1. Belanja Pegawai	40 361 053	40 661 859
2. Belanja Barang dan Jasa	176 569 187	200 909 340
3. Belanja Modal	100 804 467	127 352 205
C. Pembiayaan Daerah	128 316 156	12 162 844
Jumlah	801 356 298	720 670 636

*) *Data APBD*

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. (024) 8412802 – 8412804, Fax. (024) 8311195

Homepage : <http://jateng.bps.go.id>, E-mail : bps3300@bps.go.id

ISSN 2407-344X

